

**PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN KESERTAAN PRIA BER-KB DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

oleh : Erwindi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
erwindi_purwa@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya kerja sama yang baik antara petugas penyuluh Keluarga Berencana dengan masyarakat khususnya dengan kaum pria/suami. Permasalahan lainnya adalah belum adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program KB Pria. Rendahnya kemampuan berkomunikasi tenaga pelaksana di tingkat lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana) dalam memberikan penyuluhan tentang permasalahan KB pria. Selanjutnya kurang adanya kepastian bentuk organisasi pelaksana di tingkat Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang menangani program KB, karena kurang adanya dukungan politis yang memadai. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung Darat guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan koordinasi vertikal dalam BKKBN tidak berjalan optimal karena pimpinan BKKBN berasal dari luar BKKBN. Kondisi internal BKKBN yang masih harus dibenahi pasca pergantian pimpinan juga mengakibatkan koordinasi horisontal dengan berbagai instansi terkait kurang diperhatikan. Saat ini rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas terkait yang bersama-sama membahas tentang operasionalisasi program KB sudah tidak pernah dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam keikutsertaan KB bagi kaum pria meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pria, faktor ekonomi, tidak adanya dukungan istri, faktor persediaan KB, output pelayanan (akses, kualitas pelayanan, image), keterbatasan pilihan kontrasepsi bagi pria, keyakinan bahwa KB dilarang secara agama, serta peran pemerintah yang kurang optimal dalam mensosialisasikan KB pria maupun memfasilitasi KB pria. Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan antara lain : 1) Pemerintah di Kecamatan Pontianak Tenggara, khususnya di Kelurahan Bangka Belitung diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi vertikal maupun horisontal dalam jajarannya guna meningkatkan peserta KB pria. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai BKKBN serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk jajaran pegawai di Kelurahan Bangka Belitung dalam melakukan penyuluhan KB pria. 2) Pemerintah beserta masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung diharapkan dapat bekerjasama dalam mengatasi berbagai hambatan dalam keikutsertaan KB bagi kaum pria. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap penyebaran informasi yang benar tentang KB pria agar para pria tertarik untuk ber-KB. Pemerintah juga disarankan dapat meningkatkan akses pelayanan KB pria di Kelurahan Bangka Belitung agar kebutuhan akseptor KB pria di wilayah tersebut dapat dipenuhi.

Kata kunci : Koordinasi, Partisipasi, Suami ber KB

Abstract

The problem in this study is the absence of good cooperation between extension workers family planning officer with the public, especially with men / husbands . Another problem is the lack of clear division of tasks in the implementation of family planning programs Men . The low power communication skills at field level implementers (Extension Family Planning) in providing information about family planning issues man . Furthermore, the lack of certainty in the form of the organization implementing the Village level Pontianak

Pacific Islands Southeast District of the Army that handles planning programs , because of the lack of adequate political support . From the results of the study found that vertical coordination in the implementation of family planning male participants in the Village of the Pacific Islands to improve the planning participants Army men are still low . This is partly influenced by the decentralization policy which resulted in the BKKBN vertical coordination is not optimal because the leader comes from outside the BKKBN BKKBN . BKKBN internal conditions that still need to be addressed after the change of leadership also resulted in horizontal co-ordination with various agencies less attention . Currently coordination meeting with related elements such as scholars , public figures , and related agencies together to discuss about the operation of the family planning program had not been done . The factors that are impediments to keikutan involving the KB for men include low awareness pengetahuan and men , economic factors , the lack of support for his wife , family planning supply factors , output services (access , quality of service , image) , the limited choice for men kontarsepsi , belief that family planning is religiously prohibited , as well as less than optimal role of government in promoting and facilitating KB KB man man . Responding to the suggestion that there is a phenomenon which recommended , among others : 1) The Government in the District of East Pontianak , particularly in the Pacific Islands Village is expected to continue to increase vertical and horizontal coordination in order to increase the ranks of men planning participants . This can be done by improving employee performance BKKBN and enhance cooperation with relevant agencies , including the ranks of employees in the Village of the Pacific Islands in conducting family planning counseling men . 2) governments and citizens in the Village of the Pacific Islands are expected to cooperate in overcoming various obstacles in keikutan involving the family planning for men . This can be done by increasing awareness of the spread of true information about KB men that the men are interested in family planning . The government is also advised to increase access to family planning services in the Village of Bangka Belitung man that guy needs family planning acceptors in the region can be met .

Keywords : Coordination , Participation , Husbands KB

PENDAHULUAN.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam rangka peningkatan partisipasi dalam ber KB, salah satu sasaran programnya adalah meningkatkan pria/suami sebagai peserta KB, motivator dan kader, serta mendukung istri dalam KB dan kesehatan reproduksi, yang tolok ukurnya (1) Meningkatnya peserta KB Kondom dan Medis Operasi Pria (MOP) 10 %, dan (2) Meningkatnya motivator/kader pria 10 %.

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan di lapangan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN melalui Keputusan nomor : 70/HK- 010/B5/2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Erwindi

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Propinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Seksi khusus Peningkatan Patisipasi Pria di bawah Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bertugas menyusun paket informasi sesuai kondisi sosial, menyiapkan, dan mengembangkan segmentasi sasaran dalam rangka peningkatan partisipasi KB pria yang pelaksanaanya secara teknis di kecamatan dan desa dilaksanakan oleh PLKB dan PPLKB.

Kendatipun pertumbuhan penduduk kecenderungannya semakin turun, hal yang perlu dipahami adalah bahwa penduduk Indonesia saat ini kurang lebih berjumlah 219 juta jiwa, sehingga dapat diperkirakan angka pertumbuhan penduduk secara absolut kurang lebih 3 juta jiwa per tahun. Di Kelurahan

Bangka Belitung Darat sesuai kondisi bulan Juli 2012 menunjukkan bahwa tingkat kesertaan ber-KB sudah cukup baik, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada saat ini (2.683), yang saat ini menjadi Peserta KB Aktif (PA) berjumlah 1.778 (66,27 %). Dari jumlah Peserta KB Aktif (PA) yang ada saat ini, 465 akseptor (26,15 %) merupakan peserta aktif alat kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan / sino / implanon).

Menurut Ateng syarifudin (1998:66) koordinasi adalah kerjasama dan bekerja sama antara seluruh pejabat atau seluruh pimpinan dari semua tingkatan perlu diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pembagian kerja, pembagian tugas kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab yang dilimpahkan kepada mereka masing-masing itu dalam rangka organisasi pemerintah yang sehat, benar-benar berpegang pada pelaksanaan prinsip-prinsip, dan teknik koordinasi.

Syarifudin menegaskan bahwa dalam suatu organisasi hubungan antara bagian atau unit menentukan langkah pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang diharapkan dapat diperoleh oleh organisasi sebagai suatu kesatuan sistem secara tepat, tanpa harus terjadi pemborosan baik tenaga, waktu maupun materi.

Menurut The Liang Gie (1990:67) bahwa :

“ Koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat daripada pekerjaan yang menghubungkan-hubungkan, menyatu-padukan, menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan dalam suatu kerjasama yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan.”

Pengertian diatas menjelaskan, bahwa dengan koordinasi yang dilakukan akan dapat menghindari kekacauan, kembaran atau kekosongan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya menurut Nitisemito (1992:49) bahwa kedudukan koordinasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Koordinasi Intern yaitu Koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung, dalam hal ini pimpinan wajib mengkoordinir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan sebagai usaha mengetahui kebijaksanaan atau tugas pokok.
- b. Koordinasi Ekstern yaitu Koordinasi yang dilakukan dari berbagai organisasi atau antar organisasi yang ada kaitannya dengan hubungan kerja.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi adalah suatu penyesuaian diri dari bagian-bagian dalam memberikan sumbangan untuk menyelesaikan suatu masalah agar didapatkan hasil yang maksimum secara keseluruhan.

Tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila ada pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Untuk melakukan pengawasan menurut Hadjan (1994:74) harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan,
- b) Pengawasan kebijaksanaan : disesuaikan kebijaksanaan dari aparat

- pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi,
- c) Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah,
 - d) Alasan-alasan keuangan : peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah,
 - e) Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan seorang warga.

Selanjutnya Hadjan (1994:74) menambahkan bahwa koordinasi secara horizontal dapat diumpamakan sebagai kerjasama antara kotapraja dengan kotapraja, propinsi dengan propinsi, atau propinsi dengan kotapraja. Banyak tugas-tugas Pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Bagi suatu kerjasama diantara para instansi pemerintah diperoleh berbagai macam jalan. Jalan yang pertama adalah dengan menandatangani perjanjian yang sifatnya hukum perdata.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka masalah di batasi pada pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan partisipasi pria ber KB di Kelurahan Bangka Belitung Darat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan

Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive* yakni pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Pembina Penyuluh KB Kecamatan Pontianak Tenggara.
- b. Petugas penyuluh KB

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan analisis yang deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data dan dilanjutkan dengan membuat rangkaian analisisnya. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung dan pada akhirnya ditarik kesimpulan

PELAKSANAAN KOORDINASI PLKB DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PRIA BER-KB DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

1. Koordinasi Vertikal

Keberhasilan pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung dalam peningkatan peserta KB pria membutuhkan koordinasi vertikal yang memadai. Koordinasi vertikal yang dimaksud merupakan kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan, dalam hal ini pihak-pihak yang berkompeten dalam mensukseskan program KB (misalnya kepala BKKBN serta

kepala instansi-instansi terkait) terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Atasan dalam hal ini mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

Berdasarkan temuan di lapangan, koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya koordinasi antara Lurah Bangka Belitung sebagai pemimpin masyarakat untuk bersama-sama dengan petugas pelaksana teknis memanfaatkan segala potensi yang ada di masyarakat, termasuk tokoh agama, tenaga medis dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyampaikan tujuan dan manfaat ikut program KB khususnya KB mandiri. Terkait dengan hal ini, seorang pegawai kelurahan yang terlibat dalam kegiatan KB di Kelurahan Bangka Belitung menuturkan sebagai berikut:

“Koordinasi vertikal saya rasa masih kurang ya...Kebijakan KB umumnya dan peningkatan peserta KB pria saat ini menurut pengamatan saya kurang merakyat. Kalau menurut saya hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang KB pria yang sesungguhnya, serta koordinasi lintas sektoral yang saat ini nampaknya mengendor tidak seperti tempo dulu, dimana peran kepala daerah, termasuk lurah atau kades sangat membantu suksesnya pelaksanaan program KB.” (Wawancara dengan pegawai kelurahan yang terlibat dalam kegiatan KB, tanggal 12 Juni 2013).

Wawancara di atas memberikan gambaran bahwa koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung

Erwindi

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Kebijakan KB umumnya dan peningkatan peserta KB pria saat ini kurang merakyat karena kurangnya sosialisasi tentang KB pria, serta koordinasi lintas sektoral yang saat ini nampaknya mengendor tidak seperti tempo dulu, dimana peran kepala daerah, termasuk lurah atau kades sangat membantu suksesnya pelaksanaan program KB.

Permasalahan lain yang juga ikut mempengaruhi tidak efektifnya kebijakan peningkatan partisipasi pria adalah persoalan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, mulai dari kurangnya pelatihan-pelatihan khusus, kurangnya sarana dan prasarana kerja petugas, sampai kurang jelasnya lembaga pengelola program. Hal ini tercermin dari jarangnyanya penyuluhan KB khususnya KB pria di Kelurahan Bangka Belitung sebagai akibat dari minimnya jumlah Petugas lapangan/ Penyuluh KB. Para kader kelurahan yang terlibat dalam kegiatan KB di Kelurahan Bangka Belitung menuturkan bahwa mereka telah berupaya untuk berkoordinasi dengan BKKBN agar diadakan penyuluhan KB secara berkala, termasuk penyuluhan KB pria. Akan tetapi, realisasi usul tersebut belum berjalan optimal sebagai akibat minimnya petugas lapangan (PLKB dan PPLKB), keterbatasan anggaran serta sulitnya akses menuju Kelurahan Bangka Belitung. Kondisi ini makin diperparah dengan fakta bahwa BKKBN pusat dan provinsi tidak memiliki kewenangan pembinaan penuh terhadap institusi KB di Kabupaten dan Kecamatan. Terkait dengan hal ini, seorang Petugas lapangan KB dari BKKBN menuturkan:

“Sejauh ini koordinasi vertikal masih kurang, hal ini bisa dilihat dari kurang tegasnya pimpinan BKKBN di kabupaten dalam menindak petugas penyuluh KB yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Saya pribadi menilai bahwa hambatan peningkatan kesertaan KB pria sesungguhnya ada pada petugasnya. Suksesnya KB pria tempo dulu didukung oleh kekompakan kerja tim di semua lini, yang kalau di kecamatan adalah Tim Pembina KB atau dikenal sebagai TPKB Kecamatan, serta didukung pula dengan dana yang cukup. Lambat laun tim yang demikian ini hilang gairah kerjanya hingga akhirnya hanya BKKBN sendirian yang bekerja. Karena itu, saya berharap ke depan TPKB ini dapat diaktifkan kembali yang tentu saja didukung dengan pembiayaan yang memadai. Selain itu, koordinasi vertikal juga perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, kepala BKKBN harus terus berkoordinasi dengan jajaran anak buahnya dalam mensosialisasikan KB, lalu kepala desa hendaknya juga terus berkoordinasi dengan para kader KB di wilayahnya.” (Wawancara dengan Petugas lapangan KB dari BKKBN, tanggal 14 Juni 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari kurang tegasnya pimpinan BKKBN di kabupaten dalam menindak petugas penyuluh KB yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hambatan peningkatan kesertaan KB pria sesungguhnya ada pada petugasnya. Suksesnya KB pria tempo dulu didukung oleh kekompakan kerja tim di semua lini, misalnya di tingkat kecamatan adalah Tim Pembina KB atau dikenal sebagai TPKB Kecamatan, serta didukung pula dengan dana yang cukup. Lambat laun tim tersebut motivasi kerjanya menurun sehingga akhirnya hanya BKKBN sendirian yang bekerja. Oleh karena itu, ke depan TPKB ini diharapkan dapat diaktifkan

Erwindi

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

kembali dengan didukung oleh pembiayaan yang memadai. Selain itu, koordinasi vertikal juga perlu ditingkatkan, misalnya kepala BKKBN harus terus berkoordinasi dengan jajaran anak buahnya dalam mensosialisasikan KB, dan kepala desa diharapkan terus berkoordinasi dengan para kader KB di wilayahnya.

Selama ini, pelaksanaan program Kependudukan dan KB (KKB) sepertinya salah kaprah setelah reformasi dan otonomi daerah seperti saat ini. Karena nuansa yang ada di daerah adalah sesuai dengan keinginan pimpinan daerah. Untuk merubah image tersebut, pimpinan daerah diharapkan mendukung program KB dengan memprioritaskan pelaksanaan program KKB di daerah. Begitu pula sebaliknya, bila pimpinan daerah kurang peduli, maka program KKB akan berjalan dengan lambat.

Koordinasi vertikal juga mencakup koordinasi atasan terhadap semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Terkait dengan koordinasi vertikal, seorang petugas lapangan (PLKB dan PPLKB) yang ada di Kelurahan Bangka Belitung mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Secara reguler sebenarnya setiap sebulan sekali diadakan rapat koordinasi program KB tingkat kabupaten, yang isinya disamping menelaah, mengevaluasi kegiatan bulan sebelumnya, merencanakan kegiatan bulan berjalan, juga diisi dengan memberikan pengetahuan baru tentang KB secara umum maupun kadang-kadang khusus mengenai KB pria. Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti di tingkat kecamatan yang disampaikan kepada PLKB di bawahnya melalui rapat pertemuan yang kita sebut meeting mingguan serta rapat koordinasi bulanan bersama seluruh PLKB dan petugas PPKBD sekecamatan yang isinya secara mendetail membahas langkah-

langkah yang perlu dilakukan oleh PLKB pembinaan desa serta PPKBD. Alur koordinasi sebenarnya jelas, sayangnya dalam praktiknya belum berjalan lancar. Sebab utamanya adalah gairah kerja PLKB cenderung menurun, seperti mereka yang sudah agak tua, apalagi hampir pensiun sudah jarang mengikuti rapat ini itu. Apalagi di sini kan akses jalan dari rumah ke kantor juga jauh ya, sama seperti ketika mereka harus terjun ke desa-desa untuk penyuluhan. Akses jalan yang kurang memadai dan dana yang kurang membuat motivasi kerja mereka terus menurun.” (Wawancara dengan seorang petugas lapangan (PLKB dan PPLKB) yang ada di Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 20 Juni 2013).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi vertikal pelaksanaan peserta KB, khususnya KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria sudah terstruktur dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pertemuan reguler di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Alur koordinasi secara vertikal sebenarnya sudah jelas, sayangnya dalam praktiknya belum berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya motivasi kerja PLKB khususnya para pegawai yang sudah agak tua dan hampir pensiun. Selain itu, akses jalan yang kurang memadai dan dana yang kurang membuat motivasi kerja mereka juga terus menurun.

Selanjutnya seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya, koordinasi vertikal seperti yang Anda maksud tadi masih kurang. Setahu saya para kader KB di sini memang beberapa kali melakukan penyuluhan KB, termasuk KB pria, tetapi mereka sepertinya kurang mendapat dukungan dari kepala desa maupun PLKB pembina di desa, sehingga hasilnya kurang maksimal.” (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 24 Juni 2013).

Erwindi

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Wawancara di atas menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih kurang. Para kader KB di Kelurahan Bangka Belitung memang beberapa kali melakukan penyuluhan KB, termasuk KB pria, tetapi mereka kurang mendapat dukungan dari kepala desa maupun PLKB pembina di desa, sehingga hasilnya kurang maksimal.

2. Koordinasi Horizontal

Persoalan pengaturan kelahiran atau penambahan penduduk merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, kemitraan yang terbangun dengan para mitra kerja lintas sektor harus terus dipertahankan, seperti pelaksanaan kegiatan Posyandu, PAUD dan dengan TP-PKK dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut program KB, termasuk partisipasi pria sebagai akseptor KB. Bercermin dari hal ini maka koordinasi horisontal harus terus menerus dilakukan guna meningkatkan kemitraan dengan sejumlah elemen masyarakat. Dukungan kerjasama yang erat dengan lintas sektor, baik itu pemerintah daerah, TNI/Polri maupun elemen masyarakat dapat mendorong capaian sasaran peningkatan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung. Sayangnya, koordinasi horisontal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini tercermin dari penuturan seorang petugas lapangan KB dari BKKBN berikut ini.

“Koordinasi horisontal dalam upaya mensukseskan KB pria di wilayah ini memang minim. Menurut saya hal ini merupakan dampak dari desentralisasi kelembagaan bidang KB yang akhirnya

berimbang pada kelangsungan program, serta ketidakpastian kontinuitas program karena pimpinan dinas umumnya bukan dari orang dalam organisasi yang sudah kenyang dengan seluk beluk dan aktivitas program melainkan diambil dari luar organisasi. Hal ini tentu saja menyebabkan pimpinan yang menjabat butuh waktu untuk mengenali strategi program, sehingga dalam memenej organisasi atau dinasny kurang dapat menyatu dengan pasukan dan mitra kerja di bawahnya. Hal yang demikian jelas akan mengganggu kecepatan dan fleksibilitas program secara umum. Otomatis koordinasi horisontal dengan berbagai instansi terkait juga kurang diperhatikan karena masih terfokus dengan koordinasi internal. Oleh karena itu, solusinya adalah meskipun sudah otonomi, pemerintah pusat dan propinsi harus tetap memperhatikan program KB ini, utamanya dalam hal pembiayaan kontrasepsi bagi warga miskin serta memfasilitasi peningkatan keterampilan konseling bagi para petugas lapangan serta peningkatan karir bagi eks pegawai BKKBN.” (Wawancara dengan seorang petugas lapangan KB dari BKKBN, tanggal 26 Juni 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung berikut ini.

“Koordinasi semacam itu menurut saya sangat kurang. Jika dulu pihak BKKBN menggandeng berbagai organisasi masyarakat, misalnya organisasi agama, maka kegiatan semacam itu sekarang sudah tidak ada gemanya lagi. Padahal sebetulnya pertemuan koordinasi semacam ini penting dilaksanakan untuk menentukan arah dan langkah kerja sama yang baik guna mensosialisasikan KB pria. Saya rasa cara itu cukup efektif untuk melakukan pendekatan ke masyarakat ya...” (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 23 Juni 2013).

Kedua wawancara di atas mencerminkan bahwa koordinasi horisontal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta

KB pria masih rendah. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan koordinasi vertikal dalam BKKBN tidak berjalan optimal karena pimpinan BKKBN berasal dari luar BKKBN. Hal ini berdampak pada kecepatan dan fleksibilitas program secara umum. Kondisi internal BKKBN yang masih harus dibenahi pasca pergantian pimpinan juga mengakibatkan koordinasi horisontal dengan berbagai instansi terkait kurang diperhatikan. Oleh karena itu, solusinya adalah meskipun sudah otonomi, pemerintah pusat dan propinsi harus tetap memperhatikan program KB ini, terutama dalam hal pembiayaan kontrasepsi bagi warga miskin serta memfasilitasi peningkatan keterampilan konseling bagi para petugas lapangan serta peningkatan karir bagi eks pegawai BKKBN.

Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Lemahnya koordinasi horizontal antarinstansi telah menjadi salah satu faktor yang menghambat program-program yang dicanangkan Pemerintah, termasuk Program KB. Hal ini akhirnya berimbang pada kurang suksesnya program KB, khususnya partisipasi pria dalam program KB. Terkait dengan koodinasi horizontal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih, seorang petugas lapangan

(PLKB dan PPLKB) yang ada di kelurahan berikut ini:

“Menurut saya koordinasi antar *stakeholder* sebagaimana yang pernah dilakukan tempo dulu nampaknya sekarang ini jarang sekali diselenggarakan baik yang bersifat formal seperti rapat koordinasi maupun yang sifatnya informal oleh pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan. Kalau dulu kan ada ya rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas terkait yang bersama-sama membahas soal operasionalisasi program. Sekarang ini sepertinya tidak pernah dilakukan.” (Wawancara dengan seorang petugas lapangan (PLKB dan PPLKB) yang ada di kelurahan, tanggal 27 Juni 2013).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa koordinasi horisontal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini tercermin dari koordinasi antar *stakeholder* yang jarang sekali diselenggarakan baik yang bersifat formal seperti rapat koordinasi maupun yang bersifat informal oleh pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan. Saat ini rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas terkait yang bersama-sama membahas tentang operasionalisasi program KB sudah tidak pernah dilakukan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung Darat guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan koordinasi vertikal dalam BKKBN tidak berjalan optimal karena pimpinan BKKBN berasal dari luar

BKKBN. Pemerintah di Kecamatan Pontianak Tenggara, khususnya di Kelurahan Bangka Belitung diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi vertikal maupun horisontal dalam jajarannya guna meningkatkan peserta KB pria. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai BKKBN serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk jajaran pegawai di Kelurahan Bangka Belitung dalam melakukan penyuluhan KB pria.

Begitu juga halnya dengan koordinasi internal masih dirasakan kurang memuaskan hal ini dikarenakan BKKBN yang masih harus dibenahi pasca pergantian pimpinan juga mengakibatkan koordinasi horisontal dengan berbagai instansi terkait kurang diperhatikan. Saat ini rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas terkait yang bersama-sama membahas tentang operasionalisasi program KB sudah tidak pernah dilakukan. Pemerintah beserta masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung diharapkan dapat bekerjasama dalam mengatasi berbagai hambatan dalam keikutsertaan KB bagi kaum pria. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap penyebaran informasi yang benar tentang KB pria agar para pria tertarik untuk ber-KB. Pemerintah juga disarankan dapat meningkatkan akses pelayanan KB pria di Kelurahan Bangka Belitung agar kebutuhan akseptor KB pria di wilayah tersebut dapat dipenuhi.

REFERENSI

BKKBN, 2000, *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam*

*Program KB dan Kesehatan
Reproduksi yang Berwawasan
Gender*, Jakarta.

Handayani, Soewarno, 1993, *Pengantar
Study Administrasi dan Manajemen*,
Jakarta, Gunung Agung.

Philipus M. Hadjan, 1994, *Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.

Sarifudin, Ateng, 1998, *Pengaturan koordinasi
Pemerintah di Daerah*, Bandung,
Tarsito.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009 *Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga*. Jakarta

